

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Modal Politik

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. (Pantouw 2012)

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiologi Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan

uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) menjelaskan bahwa modal politik adalah Modal politik adalah sebuah kemampuan pelaku politik atau instansi politik yang menghasilkan keuntungan dan sebagai suatu hal yang dapat mempertahankan posisinya sebagai seorang pemimpin atau instansi yang bersangkutan. Casey membagi pasar politik menjadi empat yang berpengaruh terhadap modal politik yang dilakukan eksekutor politik atau instansi politik. Adapun pasar politik tersebut adalah pertama pemilu karena pemilu adalah suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam sistem demokrasi, kedua pelaksanaan serta perumusan sebuah kebijakan publik. Ketiga pasar politik yang memiliki hubungan dan konflik politik antar eksekutor politik dan instansi politik dalam kebijakan politik, keempat pasar politik menurut opini publik terhadap eksekutor politik dan instansi politik. Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan – tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya (Pantouw 2012)

Modal politik adalah salah satu faktor penting dalam kepemimpinan dan politik. Ini merujuk pada sumber daya, dukungan, dan kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau kelompok politik tertentu.

Perlunya modal politik dalam kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Legitimitas: Modal politik membantu memperkuat legitimasi seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki dukungan dan kepercayaan dari warga negara atau pemangku kepentingan penting lainnya, itu akan lebih mudah bagi pemimpin tersebut untuk memerintah dan mengambil keputusan yang diterima oleh masyarakat. Legitimitas ini dapat berasal dari pemilihan yang bebas dan adil, dukungan publik, atau rekam jejak yang baik dalam kepemimpinan sebelumnya.
2. Dukungan Politik: Pemimpin membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan pemerintahan atau agenda politiknya. Modal politik dapat berupa dukungan dari partai politik, anggota parlemen, kelompok kepentingan, atau pemimpin politik lainnya. Tanpa dukungan politik yang kuat, seorang pemimpin mungkin akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya atau mengambil langkah-langkah yang diinginkannya.
3. Daya Tawar: Modal politik memberikan pemimpin daya tawar yang lebih besar dalam negosiasi politik. Ketika seorang pemimpin memiliki dukungan yang kuat, ia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memengaruhi kebijakan yang diinginkannya. Ini terutama penting dalam sistem politik yang seringkali melibatkan kompromi dan negosiasi.
4. Stabilitas Politik: Modal politik juga berperan dalam menjaga stabilitas politik suatu negara atau wilayah. Pemimpin yang memiliki dukungan yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan krisis politik,

sementara pemimpin yang lemah atau tidak memiliki modal politik yang cukup dapat menghadapi permasalahan yang lebih besar, seperti ketidakstabilan sosial atau konflik politik.

5. **Implementasi Kebijakan:** Untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat, seorang pemimpin harus mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung visinya. Modal politik yang kuat dapat membantu pemimpin meyakinkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut.
6. **Representasi dan Partisipasi:** Modal politik juga mencakup kemampuan pemimpin untuk mewakili berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Pemimpin yang memiliki modal politik yang baik dapat lebih baik mendengarkan pandangan dan aspirasi beragam kelompok, sehingga meningkatkan partisipasi dan inklusi dalam proses politik.

1. **Dukungan Pemilih:** Kepala desa yang ingin berhasil harus memiliki dukungan dari penduduk desa atau pemilihnya. Ini berarti mereka harus memiliki popularitas dan kepercayaan dari masyarakat desa. Modal politik dalam bentuk dukungan pemilih akan membantu kepala desa memenangkan pemilihan kepala desa dan memperoleh legitimasi untuk memerintah.
2. **Hubungan Politik:** Kepala desa perlu membangun hubungan politik yang baik dengan pihak-pihak penting di dalam dan di luar desa. Ini termasuk hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan

lembaga-lembaga pemerintah setempat. Hubungan yang baik dapat membantu kepala desa mendapatkan bantuan, sumber daya, dan dukungan untuk proyek-proyek pembangunan desa.

3. **Kemampuan Berkomunikasi:** Modal politik juga mencakup kemampuan kepala desa untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat desa. Kepala desa harus dapat menjelaskan visi dan rencana kerja mereka kepada warga desa, serta mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu mempertahankan dukungan dan kepercayaan warga desa.
4. **Kepemimpinan dalam Penyelesaian Konflik:** Salah satu aspek penting dari modal politik dalam kepemimpinan kepala desa adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik di tingkat desa. Kepala desa yang mampu mengelola konflik antara berbagai kelompok atau individu di desa akan lebih dihormati dan dipercayai oleh masyarakat.
5. **Manajemen Sumber Daya:** Modal politik juga berhubungan dengan kemampuan kepala desa untuk mengelola sumber daya desa, seperti anggaran desa, tanah, dan aset-aset lainnya. Kemampuan untuk mengelola sumber daya ini dengan baik dan adil akan membantu mempertahankan dukungan dari berbagai kelompok di desa.
6. **Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika:** Seorang kepala desa yang menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan etika akan memiliki modal politik yang lebih besar. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas akan membantu mempertahankan integritas kepala desa di mata masyarakat.

7. Inovasi dan Pembangunan: Kepala desa yang mampu mengenalkan inovasi dan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa akan mendapatkan dukungan dan pengakuan positif. Modal politik juga dapat ditingkatkan melalui pencapaian pembangunan yang terlihat dan terukur.

Dalam konteks kepala desa, teori modal politik ini membantu menjelaskan bagaimana seorang kepala desa dapat membangun dan memelihara dukungan politik yang diperlukan untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan efektif, mengatasi tantangan, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat desa.

Teori modal politik ini akan mempermudah peneliti untuk mengetahui jenis modal politik peratin jagaraga dalam memimpin masyarakatnya selama tiga periode dan berlangsung dengan sukses.

B. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah proses, yang mepersamaan dengan proses produksi dalam sistem manajemen produksi. Terdapat dua proses kepemimpinan produksi yaitu proses masukan dan proses keluarnya pemimpin. Dalam sebuah proses kepemimpinan diperlukan waktu, yang tidak bias terjadi dalam sekejap waktu. Suatu intraksi yang terjadi juga memerlukan waktu untuk terjadinya proses kepemimpinan, yang terjadi tergantung dengan keadaan seorang pemimpin dan masyarakatnya.

Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett dan Gordon J. Corphy (2002), berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah sains (science) dan seni

(arts). Sains kepemimpinan adalah suatu pengetahuan yang melengkapi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan antara lain mempunyai objek, metode, teori, dan penelitian ilmiah. Ilmu kepemimpinan mempunyai ratusan teori ilmiah yang membentuk tubuh ilmu kepemimpinan. Ilmuwan dan teoretisi kepemimpinan melaksanakan penelitian saintifik. Kepemimpinan juga merupakan suatu seni, yaitu kepemimpinan diterapkan dalam praktik memimpin sistem sosial. Orang yang menguasai ilmu kepemimpinan belum tentu jadi pemimpin yang baik. Banyak pemimpin sukses tak pernah mempelajari ilmu kepemimpinan secara khusus tetapi, bukan berarti ilmu kepemimpinan tak ada manfaatnya. Salah satu fungsi ilmu kepemimpinan adalah membimbing praktik profesi. Dengan menguasai ilmu kepemimpinan, seseorang pemimpin dapat menggunakannya untuk menganalisis lingkungan, pengikut dan taktik- taktik memengaruhi yang akan di gunakan. (Wirawan 2013)

Robbins, menegaskan secara singkat bahwa kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. Sementara itu menurut Stoner kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompoknya, sebaliknya Koodts o'dannel dan Weihrich dalam nawawi mengemukakan kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang atau anggota organisasi sehingga rela berusaha mencapai tujuan organisasi sehingga rela berusaha mencapai tujuan organisasi dengan kemauan dan antusiasme tinggi.

Gardner, J.W. mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengaruh atau memberi teladan sehingga melalui proses itu seseorang pemimpin mendorong atau mempengaruhi sesamanya untuk dapat menuju pada tujuan yang di capai bersama, jadi kepemimpinan menurut Gardner adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengajak, mengarahkan, menyakinkan, dan memberdayakan yang di pimpin untuk mengerti memahami terlebih dahulu untuk melaksanakan tujuan organisasi atau visi dan misi bersama. (Suhadi and Arifianto 2020)

Hersey, Paul; Blanchard Kenneth H. dan Johnson, D.E mendefinisikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu dalam upaya pencapaian tujuan dalam situasi tertentu, dari proses kepemimpinan ini terdapat fungsi dari pemimpin dan pengikut. (Hawa 2012)

James Macgregor Burns (1978) memaparkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah kondisi ketika pemimpin dapat meningkatkan motivasi anggota kelompok agar mampu mencapai tujuan yang lebih menantang.

Kepemimpinan merupakan pengalaman manusia yang rasional dan emosional (Hughes, Ginnett dan Curphy, 2002). Kepemimpinan meliputi tindakan dan pengaruh berdasarkan atas alasan dan logika di samping berdasarkan inspirasi dan keinginan. Situasi kepemimpinan sangat kompleks karena orang berbeda pemikiran, perasaan, harapan, impian, kebutuhan, ketakutan, tujuan, ambisi, kekuatan, dan kelemahan. Sebab orang rasional dan emosional, para pemimpin dapat mempergunakan teknik – teknik rasional dan permintaan emosional untuk mempengaruhi para pengikutnya akan

tetapi, pemimpin juga harus mengukur konsekuensi dari tindakan rasional dan emosionalnya. (Wirawan 2013)

Kepemimpinan seorang pemimpin memiliki berbagai aspek penting yang memengaruhi organisasi, masyarakat, atau kelompok yang mereka pimpin. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepemimpinan seorang pemimpin sangat penting

1. Mengarahkan Visi dan Misi: Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam merumuskan visi dan misi organisasi atau kelompok. Mereka dapat menggambarkan arah yang jelas dan memberikan tujuan yang menginspirasi kepada anggota atau karyawan. Ini membantu menyatukan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama.
2. Mendorong Perubahan Positif : Pemimpin memiliki kekuatan untuk menginisiasi dan mendorong perubahan positif. Mereka dapat mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan membawa perubahan yang diperlukan. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi orang-orang untuk beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi.
3. Pengambilan Keputusan: Seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang signifikan, terkadang dalam situasi yang kompleks dan ambigu. Kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang bijak dan rasional dapat berdampak besar pada kinerja dan kelangsungan organisasi.
4. Mengelola Sumber Daya : Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi, termasuk anggaran, tenaga kerja,

waktu, dan aset lainnya. Kemampuan mereka dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini dapat berkontribusi pada keberhasilan organisasi.

5. **Motivasi Dan Pengaruh** : Pemimpin memiliki peran penting dalam memotivasi anggota tim atau karyawan. Mereka dapat memberikan dorongan, pengakuan, dan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selain itu, pemimpin yang karismatik dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti mereka dengan sukarela.
6. **Menyediakan Orientasi Dan Kepemimpinan** : Pemimpin membantu memberikan orientasi yang diperlukan kepada anggota tim atau karyawan. Mereka memastikan bahwa tujuan dan tugas-tugas didefinisikan dengan jelas, dan memberikan panduan dalam mencapainya. Ini membantu menghindari kebingungan dan konflik di dalam organisasi.
7. **Memelihara Keharmonisan Dan Kemanan**: Pemimpin juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja atau sosial yang aman dan harmonis. Mereka harus mempromosikan kerja sama, mengelola konflik, dan menjaga ketertiban.
8. **Pemberian Contoh** : Pemimpin seringkali dianggap sebagai panutan oleh anggota kelompok atau organisasi. Mereka harus memberikan contoh perilaku yang baik, etika, dan nilai-nilai yang diinginkan. Pemimpin yang baik akan memotivasi orang lain untuk mengikuti teladan positif mereka.
9. **Koordinasi Dan Kalaborasi**: Seorang pemimpin memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan kerjasama di antara

anggota tim atau berbagai departemen dalam organisasi. Kemampuan mereka dalam memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

10. Akuntabilitas : Pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mereka juga harus memastikan bahwa anggota tim atau karyawan juga bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Akuntabilitas adalah salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, pemerintahan, organisasi masyarakat, atau kelompok lainnya. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengelola orang-orang dengan cara yang menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan.

Kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam kemajuan desa seorang pemimpin sudah pasti memiliki kekuasaan sebagai kekuatan dirinya untuk mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam melakukan suatu hal, peranan pemimpin dalam memimpin desa sangat di perlukan dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang di pimpinnya.

C. Konsep Peratin Dalam Masyarakat Desa Jagaraga Lampung Barat

Peratin adalah sebutan yang lazim di gunakan untuk kepala desa di kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat, peratin sama saja dengan kepala pekon atau desa yang memiliki tugas yang sama dengan kepala desa hanya saja sebutan di daerah lampung barat di sebut dengan peratin, yang memiliki wewenang, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatannya selama 6 (enam) tahun dan dapat di perpanjang lagi menjadi 3 (tiga) kali masa jabatan. Peratin tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat, peratin bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Admweb 2022)

Peratin atau Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. peratin merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Menurut Bayu Surianingrat (1992: 81) “menyatakan bahwa kepala desa atau peratin adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan pamong desa. Peratin adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah”.

Menurut Sondang P. Siagaan (2007: 20) menyatakan bahwa: Kepala desa (peratin) adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa memiliki masa jabatan selam 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya peratin (lampung barat) Wali Nagari (Sumatera Barat), Pambakal (Kalimantan Selatan), Hukum Tua (Sulawesi Utara). Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa merupakan pemimpin penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama BPD (badan permusyawaratan desa) yang memiliki fungsi memberikan struktur yang jelas dari situasi – situasi yang rumit, mengawasi dan sebagai sarana penyalur perilaku masyarakat yang dipimpinnya serta sebagai juru bicara masyarakat yang dipimpinnya.(Yasinda, Suntoro, and Yanzi 2017)

Tugas utama peratin bukanlah membangun dari pada infrastruktur desa, namun yang paling utama tugasnya ialah mengayomi dan melindungi masyarakatnya masing masing tanpa membeda bedakan suku, agama, maupun yang ikut mendukung atau tidak pada saat pesta demokrasi lalu. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, menjadi contoh serta panutan.

Peratin diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah pemimpin desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, peratin wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat

secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas (Londa 2017).

D. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber- sumber kekuatan untuk menunjang sector kekuasaanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis kekuasaan berasal dari bahasa inggris power yang berarti memiliki kemampuan berbuat dan bertindak, Menurut Dahl power identik dengan influence, authority dan rule. Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu (Joni 2020)

Miriam Budiardjo, mengutarakan beberapa pendapat ahli mengenai kekuasaan antara lain:

1. Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar dari kemampuan ini.
2. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat

menentukan tindakan seseorang atau sekelompok orang lain ke arah tujuan dari pihak pertama.

3. Talcott Parson, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjain terlaksananya kewajiban – kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan – kesatuan dalam sistem organisasi kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi – sanksi dianggap wajar terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Pelopop pertama yang mempergunakan istilah kekuasaan adalah sosiolog kenamaan Max Weber merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan Walter Nord merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mem-pengaruhi aliran, energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Kekuasaan dipergunakan hanya jika tujuan-tujuan tersebut paling sedikit mengakibatkan perselisihan satu sama lain Russel mengartikan kekuasaan itu sebagai suatu produksi dari akibat yang diinginkan. Russel dan Bierstedt mengatakan bahwa kekuasaan itu kemampuan untuk mempergunakan kekuatan. Wrong membatasi kekuasaan hanya pada suatu kontrol atas orang lain yang berhasil.(Fitri 2013)

1. Sumber Kekuasaan

Sebelum memahami teori/konsep kekuasaan yang ideal menurut para ahli, hendaknya kita juga perlu untuk mengetahui sumber-sumber kekuasaan. Menurut JRP French dan Bertram Raven, sAda beberapa cara

yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yakni sebagai berikut:

- a. Legitimate Power Legitimate berarti pengangkatan, jadi legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan.
- b. Coersive Power Coersive berarti kekerasan, jadi coersive power adalah perolehan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (coup d'eta). Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah, dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.
- c. Expert Power Expert berarti keahlian, jadi expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku di negara demokrasi karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai merit sistem.
- d. Reward Power Reward berarti pemberian, jadi reward adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh perhatikan bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Reverent Power Reverent berarti daya tarik, jadi reverent power adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun

daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakaian yang pantas dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.

2. Jenis Kekuasaan Di Indonesia

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

1) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Secara singkatnya kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. (Nindy 2021)

2) Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan yang memiliki peran untuk setuju atau mengubah UUD. Kekuasaan konstitutif terdiri dari anggota MPR dan sifatnya juga berada di pusat. Kekuasaan ini tidak secara asal pilih.

3) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang memegang peran di pemerintahan pusat . sesuai yang tertera di

UUD pasal 4 ayat 1. Mekanisme pembagian kekuasaan yang di laksanakan di Indonesia adalah presiden

4) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif di pegang oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 pemegang kekuasaan yudikatif adalah kehakiman untuk kegiatan yang berdasarkan lingkungan peradilan secara luas

5) Kekuasaan Inspektif

Secara luas kekuasaan ini mengatur sekaligus memegang tanggung jawab keuangan Negara, dan pemegang peran ini adalah BPK

6) Kekuasaan Moneter

Kekuasaan moneter bersifat untuk mengatur keuangan baik di pasar nasional maupun internasional. Kekuasaan moneter di pegang oleh BI dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini.

b. Pembagian Kekuasaan Vertikal

Peran terstruktur dan bertingkat, artinya setiap pemegang peran ini memiliki kedudukan yang tidak sama. Pembagian ini dijelaskan pada pasal 18 ayat 1 UUD. Dilaksanakan di Indonesia secara vertikal dimulai dari urutan kabupaten /kota, provinsi, hingga pusat. Kedudukan ini berjenjang dari atas ke bawah dan pembagian ini bertujuan untuk tugas yang lebih efektif. Pemerintahan pusat akan diletakan di ibu kota dan menjalankan peran yang sifatnya

skala luas, termasuk membantu semua pemerintah daerah ke seluruh wilayah.

Pemerintah daerah hanya akan mengurus wilayah yang ditempatinya. Adalah penerapan otonomi daerah, mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia sehingga dapat menyelenggarakan program keamanan dan fiscal sendiri.

c. Kekuasaan Antarpribadi

John R.P. French dan Bertram Raven mengajukan lima basis kekuasaan antarpribadi, yaitu :

1) Kekuasaan Legitimasi

Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain karena posisinya. Seseorang yang tingkatnya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Dalam teori, orang yang mempunyai kedudukan sederajat dalam organisasi kekuasaan. Kekuasaan legitimasi sangat serupa dengan wewenang, selain seni pemegang kekuasaan, pihak yang dikuasai (bawahan) memainkan peranan penting dalam pelaksanaan penggunaan legitimasi. Batas – batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan system nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. (Kolip 2013)

2) Kekuasaan Imbalan

Kekuasaan imbalan di dasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain

(pengikutnya) karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan di gunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi.

3) Kekuasaan Paksaan

Kekuasaan paksaan sering kali di kaitkan dengan kekuasaan imbalan yaitu kekuasaan yang menghukum. Hukuman adalah konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian hukuman kepada seseorang dimaksud juga untuk memodifikasi , hukuman perilaku yang tidak baik, dengan bermaksud merubah perilaku menjadi lebih baik.

4) Kekuasaan Ahli

Seseorang memiliki kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif yang dinilai mempunyai kekuasaan walaupun kedudukan mereka rendah.

5) Kekuasaan Panutan

Banyak individu yang menyatukan diri atau di pengaruhi seseorang karena gaya keperibadian atau perilaku orang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan.

Kelima jenis kekuasaan antarpribadi tidak lah berdiri sendiri atau terpisah - pisah. Seseorang dapat menggunakan basis kekuasaan tersebut secara efektif melalui berbagai kombinasi, penggunaan basis kekuasaan tertentu bias mempengaruhi jenis kekuasaan orang lain.